

Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Wasiatun hasanah¹, Adelia², Wulan ayu musyirifah³, Putri Kamilatul Rohmi⁴

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Wasiatunhasanah572@gmail.com, adelian570987@gmail.com, wulanayumusyirifah@gmail.com

Abstrak

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SIPD dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Jember telah membantu dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah secara lebih sistematis dan terintegrasi. Selain itu, SIPD juga berkontribusi dalam pengelolaan aset daerah dengan mendukung pencatatan, pemantauan, serta evaluasi aset secara lebih akurat. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan SIPD, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pengguna, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan peran SIPD, diperlukan peningkatan pelatihan bagi aparatur daerah, penyempurnaan sistem, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat. Dengan optimalisasi SIPD, diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jember dapat lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Kata Kunci: peran, SIPD, BPKAD, pengelolaan keuangan daerah

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia tengah menjalani proses pembangunan menuju pemerintahan yang menerapkan prinsip Good Governance. Pemerintahan yang baik ini ditandai oleh adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan sistem tersebut. Penerapan Good Governance di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, memiliki peranan yang sangat vital guna memastikan bahwa laporan keuangan disampaikan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan efektif.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menjadi sebuah sistem dengan fungsi untuk mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan mengelola data pembangunan daerah sebagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi ini juga digunakan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pelaksanaan, juga evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan informasi terkait pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya perlu saling terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang efisien. Oleh karena itu, diharapkan setiap pemerintahan kabupaten/kota hingga provinsi dapat mengimplementasikan sistem informasi ini dalam tata kelola keuangan daerah mereka. Putri, F.D., & Tandean, V.A. (2025)

Menurut putri (2021) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi sebuah sistem dengan fungsi untuk mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan mengelola data pembangunan daerah. Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang mampu diakses dari masyarakat serta menjadi landasan ketika pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Melalui SIPD, diharapkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah dapat dioptimalkan.

Selain itu, penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diharapkan dapat menyatukan persepsi terkait pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah yang efektif. SIPD juga diharapkan menjadi sarana untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan daerah, yang pada akhirnya membuat penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovatif, dan berkualitas.

Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya, permasalahan dalam implementasi SIPD juga terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan keuangan daerah di BKAD tersebut masih dianggap kurang efektif, terlihat dari berbagai kendala yang dihadapi, seperti belum tersedianya fitur-fitur yang dibutuhkan di setiap bidang. Selain itu, sering terjadi masalah teknis, termasuk kesulitan dalam mengakses aplikasi SIPD, server yang sering mengalami

kesalahan, dan jaringan server yang terkadang macet atau memerlukan waktu lama untuk memuat. Semua kendala ini menunjukkan bahwa pengimplementasian SIPD masih belum optimal. (Zuhra, Shalsadila & Irawan, 2024)

Menurut penelitian Fahzura dan Najamudin (2022) di kabupaten aceh barat menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum berfungsi secara optimal. Sedangkan, penelitian lain oleh Balqis dan Fadhly (2021) menjelaskan mengenai menurut analisis dengan poin kualitas dengan mencakup klasifikasi yang mampu dipahami, andal, relevan, serta mampu dibandingkan mengenai SIPD sudah terbilang efektif. Namun, menurut penelitian terdahulu mengenai sistem Informasi Pemerintah Daerah, terlihat mengenai pemanfaatan SIPD di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum seluruhnya berjalan dengan sempurna. Sejumlah OPD masih menghadapi berbagai permasalahan ketika penggunaan aplikasi ini, baik yang terkait dalam sistem tersebut, sumber daya, komunikasi, juga beberapa faktor yang lain.

Pada awal penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD), banyak instansi menghadapi berbagai kendala dan masalah. Salah satu yang sering terjadi adalah sistem yang mengalami error, yang mengakibatkan perlambatan dalam pekerjaan instansi tersebut. Beberapa instansi bahkan lebih memilih untuk tetap menggunakan sistem yang lama

METODE

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan dalam menggambarkan dan menganalisis peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mengelola keuangan dan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Pendekatan deskriptif kualitatif dapat dimanfaatkan untuk menyelidiki dampak implementasi SIPD terhadap kinerja BPKAD di Kabupaten Jember. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan staf BPKAD, mengamati cara kerja mereka, dan menganalisis dokumen relevan guna mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai peran SIPD dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menemukan elemen-elemen yang mendukung atau mempersulit efektivitas SIPD, sekaligus memahami pandangan dan pengalaman pegawai tentang penggunaan sistem ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga untuk perbaikan sistem informasi pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan serta aset di Kabupaten Jember.

2. Lokasi dan subjek penelitian

Pengabdian ini dengan tema “Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember”, bertempat di Pemerintah Kabupaten Jember di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari penelitian ini yaitu:

- 1) Observasi menjadi peneliti mengamati dengan langsung penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam aktivitas pengelolaan keuangan dan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Dokumentasi yaitu regulasi, laporan keuangan, dan kebijakan daerah terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dikaji dalam menilai efektivitas sistem dalam konteks peraturan yang berlaku.

4. Identifikasi Tantangan Dan Solusi

Jika ditemukan kendala teknis dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), misalnya kurangnya SDM secara terampil atau infrastruktur yang belum optimal, solusi yang mungkin diterapkan yaitu:

- a) pelatihan intensif bagi pegawai terkait penggunaan SIPD
- b) peningkatan infrastruktur IT untuk mendukung kelancaran pada sistem
- c) evaluasi kebijakan penggunaan SIPD untuk memastikan sistem lebih mudah digunakan dan selaras dengan kebutuhan daerah.

Gambar1.1 Tampilan Awal Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

GAMBAR 1.2 Tampilan isi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Badan pengelolaan keuangan serta asset daerah (BPKAD) adalah instansi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mendukung tugas walikota dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Instansi ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, serta penyusunan serta penerapan pada bidang keuangan juga aset daerah. Selain itu, BPKAD juga menjalankan tanggung jawab yang lain yang dibebankan dari pimpinan sejalan terhadap perannya. (Vitriana, 2022)

Sistem informasi adalah sebuah tahapan yang memperoleh data maupun input beserta instruksi, kemudian mengolah data tersebut seperti petunjuk yang diberikan, juga akhirnya memperoleh output. Pada hakekatnya, makna dari Sistem Informasi Pemerintah mencakup pengembangan seruntutan sistem dengan tersusun atas perangkat keras, perangkat lunak, juga sumber daya manusia yang berkolaborasi dalam proses dalam mendukung satu sama lain ketika pengolahan data, sehingga dapat membuat informasi yang dibutuhkan (Nataniel & Hatta 2009).

Pada aspek yang lain, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat dipahami menjadi pengelolaan informasi yang dilakukan dengan tersusun. Sistem ini berlandaskan pada kinerja dengan memahului berbagai prinsip efisiensi juga efektivitas, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan organisasi pada berbagai tingkat pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat (KAUR,2008)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terdapat kelebihan dalam mengelola berbagai informasi penting, seperti perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, juga informasi terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, sistem ini diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada tingkatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, serta Kota. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung berjalannya pemerintahan secara lebih bermutu, responsif, juga inovatif. Dengan integrasi informasi pembangunan daerah dan keuangan, SIPD diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. Alfarishi, A. F., & Hartati, S. (2024)

➤ Implementasi aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki keunggulan secara signifikan dalam menyimpan dan mengelola berbagai informasi penting, seperti keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, maupun data mengenai pembinaan serta pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah untuk sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yang berlaku pada tingkatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, serta Kota. Dengan demikian, diharapkan sistem ini mampu meningkatkan kualitas, inovasi, dan responsivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. SIPD berfungsi sebagai platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan informasi mengenai pembangunan daerah dan keuangan, juga informasi penting yang lain dengan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. (Alfarishi, 2024).

Berikut ini adalah pembahasan terkait penerapan SIPD dengan dimensi sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi terdapat fungsi secara sangat utama untuk menjalin hubungan antarorganisasi. Hal ini juga berlaku dalam implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan hasil kebijakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk keberhasilan kebijakan tersebut, komunikasi menjadi kunci yang harus diperhatikan. Dimensi komunikasi meliputi indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, BPKAD Kota Jember telah melaksanakan komunikasi dengan baik. Hal ini diketahui pada interaksi yang terjalin antara BPKAD sebagai pelaksana SIPD dan pihak-pihak pusat yang berperan sebagai pengembang aplikasi pemerintah berbasis website tersebut. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, rapat koordinasi, dan workshop mengenai aplikasi SIPD.

BPKAD Kota Jember berkomitmen untuk memastikan bahwa pada tahun 2022, aplikasi berbasis website yang mereka kembangkan dapat digunakan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Pada tahun 2021, ketika aplikasi tersebut pertama kali diluncurkan, masih banyak kendala yang dihadapi. Akibatnya, BPKAD terpaksa menggunakan aplikasi pendukung untuk membackup data sampai proses pelaporan selesai. Komitmen BPKAD untuk terus meningkatkan kualitas aplikasi ini terlihat dari konsistensi mereka dalam mengadakan pelatihan dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, setiap kali menghadapi masalah, seperti kesalahan sistem saat penginputan data atau fitur yang tidak dapat diakses meskipun menuanya tersedia. (Tumija, 2023).

b. Sumber daya

Berdasarkan analisis yang sudah dilaksanakan, penulis memperoleh kesimpulan mengenai dimensi sumber daya manusia di Pemerintah Kota Jember sudah terpenuhi. Kesimpulan ini sejalan dengan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jember. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), jumlah sumber daya manusia yang terlibat juga cukup memadai. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jember Nomor 685 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Jember pada Tahun 2022. Kemudian dari indikator fasilitas, pemerintah kota jember sudah memebrikan fasilitas, namun belum memadai. Hal ini tampak dari adanya kendala pada jaringan atau server system dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait bagaimana penerapan SIPD. Dalam hal indikator anggaran, berdasarkan hasil wawancara serta data yang didapatkan, mampu diperoleh kesimpulan mengenai Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan program SIPD. Hal ini dikarenakan anggaran menjadi salah satu aspek penting untuk membantu keberhasilan berjalanya program kegiatan tersebut. (Tumija, 2023)

➤ Efektifitas aplikasi SIPD

1. Pencapaian tujuan

Menurut Permendagri No. 70 Tahun 2019, tujuan perancangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah untuk menciptakan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi secara elektronik, yang dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Inisiatif tersebut bertujuan dalam mendukung berjalanya pemerintahan secara lebih inovatif, kreatif, juga responsif. SIPD dirancang juga dalam mempermudah proses perencanaan dan penyusunan dokumen anggaran secara terhubung pada semua daerah. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan SIPD, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset daerah Jember, R1, sebagai Kepala Bidang Anggaran, menjelaskan mengenai "Pelaksanaan SIPD di bidang anggaran saat ini berjalan lancar tanpa kendala. Dengan adanya SIPD, pengolahan data perencanaan dan penganggaran daerah menjadi lebih efektif. Kita tidak perlu lagi menambah standar harga barang; cukup klik kode yang diperlukan dan melakukan input, sistem akan bekerja secara otomatis. Proses penyusunan anggaran dan penyampaian informasi pun masih berjalan dengan baik, sesuai ketentuan. Bahkan, kebijakan ini sudah ditetapkan untuk mulai diterapkan dalam penyusunan anggaran Tahun 2021."

2. Integrasi

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara informasi perencanaan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kesesuaian ini sangat krusial untuk mendukung pengembangan daerah dan telah diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran (R2) mengenai sinkronisasi data antara BPKAD dan OPD lainnya dalam konteks SIPD, R2 menyampaikan bahwa, "BPKAD telah memastikan kesesuaian data terkait SIPD dengan OPD lain, khususnya dengan Bappeda. Hal ini penting agar informasi yang disajikan dapat sinkron. Semua ini juga diatur dan dijelaskan dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, mulai dari perencanaan daerah hingga analisis informasi pemerintah lainnya. Jadi, kesesuaian data merupakan hal yang sangat penting." (Vitriana 2022)

➤ Jenis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut

1. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah memiliki kemampuan dalam mengelola data juga informasi yang berhubungan terhadap perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan beberapa elemen yang relevan. SIPD juga berfungsi untuk memfasilitasi penyusunan dokumen penting seperti RPJPD, RENSTRA PD, RPJMD, RKPD, serta RENJA PD. Dengan demikian, analisis serta profil pelaksanaan pembangunan daerah dapat diperoleh dengan mudah, dan informasi ini mampu dimanfaatkan dasar dalam memperbarui data serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

Berbagai aspek, seperti kondisi geografis daerah, ekonomi, demografi, potensi sumber daya, serta tingkat kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing suatu daerah, merupakan informasi yang terkandung dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah dapat mengelola data keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien, berkat keterkaitan berbagai elemen yang ada. Dalam pengelolaannya, sistem ini tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud mencakup:

- a. Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- c. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
- d. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- e. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- f. Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan data keuangan daerah (BPKAD) memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam upaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah. Dalam proses perencanaan, pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara rinci dan dilaksanakan dengan tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Selain itu, pengkodean kegiatan secara nasional juga berkontribusi besar dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat, terutama dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi umum dengan berhubungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Informasi ini mencakup Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam periode satu tahun, Peraturan Daerah (PERDA), serta berbagai informasi umum yang lain yang dikelola dari beberapa elemen terkait. (Nasution, I, M. 2021)

➤ Tujuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Menurut Pesak et al. (2021), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan, pada tingkatan daerah atau juga pusat.
2. Menunjukkan kemudahan proses monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menyediakan data dan informasi yang relevan untuk menyusun pembangunan daerah serta kebijakan yang tepat.
4. Mendukung penetapan prioritas permasalahan yang dihadapi pada daerah.
5. Meningkatkan kualitas produk kebijakan publik.
6. Memajukan potensi ekonomi di masing-masing daerah.

Berdasarkan pendapat Amanah (2018) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai jaringan dengan memperoleh data dengan tersusun pada daerah maupun pusat menjadi dukungan pada perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. SIPD terdapat beberapa tujuan diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, baik di Daerah maupun di Pusat
2. Mendukung Penetapan Prioritas Permasalahan di Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Produk-produk Kebijakan Publik
4. Memudahkan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Mendukung Data dan Informasi dalam Penyusunan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah
6. Mempromosikan Potensi Ekonomi Daerah

Berdasarkan pendapat Inzany et al. (2022), penerapan aplikasi berbasis website ini terdapat tujuan dalam meningkatkan juga mempermudah percepatan pada pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah pada seluruh Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan aplikasi ini di lingkungan Pemerintahan Daerah tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama antar instansi, penguatan regulasi, juga waktu yang cukup dalam memastikan implementasinya berlangsung secara seragam di seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia. Mengingat bahwa program pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini merupakan proyek strategis untuk pertahanan nirmiliter negara. (Jauhari 2023)

➤ **Kelebihan dan Kelemahan SIPD**

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mempunyai sejumlah keunggulan yang mendukung pengelolaan dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki SIPD:

1. Integrasi Data

SIPD memungkinkan penggabungan data dari berbagai sumber, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang berlandaskan terhadap data secara akurat. Hal ini berkontribusi pada terciptanya satu sumber kebenaran untuk informasi seputar pembangunan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya SIPD, informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Ini pada gilirannya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.

3. Peningkatan Efisiensi

Sistem ini berperan dalam mengurangi duplikasi data dan meminimalkan kesalahan dalam proses penginputan. Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan informasi dapat ditingkatkan secara signifikan.

4. Perencanaan yang Lebih Baik

SIPD menyediakan alat analisis yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini membuat perencanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Setiawan, A. (2022)

Selain mempunyai kelebihan, Sistem informasi pemerintahan daerah juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:

1. Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi

SIPD memerlukan infrastruktur teknologi secara memadai, diantaranya jaringan internet secara stabil juga perangkat keras secara sesuai. Di daerah dengan infrastruktur yang kurang baik, implementasi SIPD dapat terhambat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak daerah yang mungkin tidak terdapat sumber daya manusia secara cukup terampil dalam mengoperasikan dan memelihara sistem informasi. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penginputan data dan pengelolaan informasi.

3. Kualitas Data

Data yang diinput ke dalam SIPD sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Jika data yang dimasukkan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil analisis dan perencanaan juga akan terpengaruh negatif.

4. Biaya Implementasi

Meskipun SIPD dapat meningkatkan efisiensi jangka panjang, biaya awal untuk implementasi sistem, pelatihan, dan pemeliharaan dapat menjadi beban bagi anggaran daerah, terutama bagi daerah dengan keterbatasan anggaran.

5. Keamanan Data

Pengelolaan data sensitif dalam SIPD dapat menimbulkan risiko kebocoran data atau serangan siber. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi penting. Santoso, R. (2021)

KESIMPULAN

Peran SIPD dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD mendukung berbagai proses, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, yang dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pengelolaan aset daerah dengan memastikan bahwa pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset dilakukan dengan lebih akurat.

Kendala dalam Implementasi SIPD

Meski SIPD menawarkan banyak manfaat, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan gangguan pada server, menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya pemahaman pengguna tentang sistem dan minimnya pelatihan serta sosialisasi menyebabkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dapat mengadopsi SIPD secara optimal.

Efektivitas SIPD dalam Pencapaian Tujuan

SIPD terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya sistem ini, pengolahan data dapat dilakukan secara otomatis, yang mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam memastikan kesesuaian antara informasi perencanaan pembangunan daerah dengan informasi keuangan, sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019.

Kelebihan dan Kelemahan SIPD

SIPD menawarkan berbagai keunggulan, seperti integrasi data yang lebih baik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menghadapi beberapa kelemahan, seperti ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, biaya implementasi yang relatif tinggi, dan risiko keamanan data yang perlu diwaspadai.

Secara keseluruhan, SIPD memiliki peran yang krusial dalam mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik. Agar implementasinya dapat berjalan dengan optimal, diperlukan peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang lebih kokoh dari pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SIPD dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang berjudul “PERAN SIPD PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER JEMBER” Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman, semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan bagian kebbaikannya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy.,M.E selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa.
2. Bapak JUPRIONO, ST,M.Si selaku kepala pimpinan lembaga pemerintahan kabupaten badan pengelolaan keuangan dan aset daerah jember beserta karyawan pengelola yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama penulisan jurnal.
3. Orang Tua yang telah memberikan do'a dan dukungan selama berlangsungnya penulisan jural ini.
4. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulisan jurnal ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan. Kami selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan jurnal ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dalam penulisan kedepannya. Jika dalam penyusunan jurnal ini masih terdapat kata-kata yang kurang berkenang di hati pembaca, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekuivalensi*, 9(1), 45-58.
- Putri, F. D., & Tandean, V. A. (2025). ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PRABUMULIH. *Journal Accounting International Mount Hope*, 3(1), 9-18.
- Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 79-91.

- Pratommi, M. W., & Muhsyaf, S. A. (2023). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99-109.
- Alfarishi, A. F., & Hartati, S. (2024). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PALEMBANG. *EKSISTANSI*, 13(1), 34-44.
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64-77.
- Zuraidah, Z., & Taufikurrahman, M. A. (2024). Evaluasi peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD: Studi kasus di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 18(2), 258-266.
- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150-164
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Pulungan, I. & Gunawan, A., (2025) Analisis Of The Impact Of Econimic Digitalization On Economic Growth On The Island Of Sumatra. *Journal Of Islamic Ekonimic Perspectives (JIEP)* 7 (1)
- Jauhari, M. (2023) IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA TANJUNGPINANG